ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Meuthia Febrianty
NPP. 33.0993
Program Studi Keuangan Publik
Email: meuthiafebrianty@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Fitri Yul Dewi Marta, S.IP, M.Si.
Email: fitri.yul@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap):. *The author focuses on the suboptimal financial performance of the Polewali Mandar Regency Government, characterized by low fiscal independence, high dependence on central government transfers, and suboptimal realization of Regional Original Income. This situation indicates a gap between the goals of regional autonomy and financial capacity.* ***Purpose:*** *The aim of this study is to analyze the financial performance of the Polewali Mandar Regency Government.* ***Method:*** *This study uses a qualitative descriptive method with an analysis of regional financial performance according to Mahmudi's theory (2016). Data collection techniques were carried out using data analysis, documentation, and in-depth interviews (with three informants).* ***Result:*** *Research findings indicate that the financial performance of the Polewali Mandar Regency Government remains suboptimal. The regional financial independence ratio and degree of fiscal decentralization are low, indicating a high dependence on central government transfer funds. The PAD effectiveness ratio fluctuates and fell short of the established target for the 2022–2024 period. Furthermore, the efficiency and growth ratios indicate that regional financial management and fiscal capacity development have not been optimal and consistent. Overall, regional financial performance still demonstrates low fiscal capacity to support the implementation of independent regional autonomy.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the financial performance of the Polewali Mandar Regency Government in implementing regional autonomy is still suboptimal. This is indicated by the low level of regional financial independence and degree of fiscal decentralization, high dependence on central government transfer funds, and inconsistent results in regional financial effectiveness, efficiency, and growth. The research recommends optimizing Regional Original Income (PAD), improving regional asset management, and developing local economic potential to strengthen fiscal independence and support the more effective implementation of regional autonomy.*

Keywords: *Fiscal Decentralization, Fiscal Independence, Regional Autonomy, Regional Financial Performance, Regional Original Income.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya kemandirian fiskal, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan otonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis kinerja keuangan daerah menurut Teori Mahmudi (2016). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis data, dokumentasi dan wawancara mendalam (3 informan). **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar masih belum optimal. Rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal berada pada kategori rendah yang menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Rasio efektivitas PAD mengalami fluktuasi dan pada periode 2022–2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan perkembangan kapasitas fiskal belum berjalan secara optimal dan konsisten. Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah masih menunjukkan rendahnya kemampuan fiskal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan otonomi daerah masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan keuangan daerah yang belum menunjukkan hasil yang konsisten. Adapun saran penelitian ini yaitu perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pengelolaan aset daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal guna memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara lebih efektif.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan sesuai potensi wilayah masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Meko et al., 2024). Tujuan utama otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara mandiri (Piola, 2022). Namun, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya. Daerah dapat dikatakan mampu menjalankan otonomi daerah secara optimal apabila memiliki kinerja keuangan yang memadai dan tingkat kemandirian fiskal yang baik (Ningsih, 2022). Untuk mewujudkan kinerja keuangan yang baik, pemerintah daerah perlu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi pengelolaan keuangan. Dari perspektif pemerintahan daerah, Suwanda et al., (2023:34) menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan daerah, tetapi juga pada kualitas tata kelola keuangan yang diterapkan pemerintah daerah (Thahir, 2019).

Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi permasalahan kinerja keuangan yang ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Selama periode 2020–2024, kontribusi dana transfer jauh lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan pada tahun 2024 lebih dari 80% pendapatan daerah masih berasal dari transfer pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas dan belum sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal. Selain itu, realisasi PAD pada periode 2022-2024 tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian PAD mengindikasikan belum optimalnya penggalian potensi ekonomi daerah, baik melalui pajak daerah, retribusi, maupun aset. Menurut Mahmudi (2016), kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menggali sumber pendapatan, mengelola aset secara efisien, dan menciptakan inovasi fiskal yang berkelanjutan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak (Chasanah & Panjawa, 2020), keterbatasan kompetensi aparatur ,serta belum optimalnya pengelolaan aset daerah menjadi beberapa faktor yang menghambat peningkatan PAD di Kabupaten Polewali Mandar (Pilat & Morasa, 2017).

Di sisi lain, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami peningkatan selama periode 2020–2024. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut belum diikuti oleh peningkatan kemandirian fiskal maupun penurunan kemiskinan yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar masih memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang ditunjukkan oleh rendahnya kemandirian fiskal, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat belum mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal maupun menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan desentralisasi fiskal yang menekankan kemandirian daerah dengan realitas yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar.

Secara konseptual, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangannya secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya peningkatan aktivitas ekonomi daerah belum diikuti oleh peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum memberikan dampak optimal terhadap kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik.

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu adanya perbedaan antara kondisi ideal yang diharapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan kondisi aktual yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat seharusnya mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kontribusi PAD, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kinerja keuangan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah,

faktor-faktor yang menghambat peningkatan kinerja keuangan, serta upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi permasalahan kinerja keuangan daerah yang ditandai dengan tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, rendahnya kontribusi PAD, serta belum tercapainya target PAD dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah, meskipun pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, pemerintah daerah akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam mengidentifikasi kondisi dan faktor penghambat kinerja keuangan daerah. Akibatnya, kebijakan yang diambil berpotensi kurang tepat sasaran sehingga upaya peningkatan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada berbagai penelitian terdahulu yang membahas kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta desentralisasi fiskal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih relatif rendah dan ditandai oleh tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Chasanah dan Panjawa (2020) menemukan bahwa meskipun efektivitas PAD berada pada kategori baik, ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih tinggi. Ningsih (2022) juga menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih terbatas karena rendahnya tingkat kemandirian fiskal. Temuan serupa dikemukakan oleh Lilis dan Permatasari (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya kontribusi PAD dan meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer menjadi hambatan dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, Meko et al., (2024) menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Ireeuw et al., (2020) juga menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, Puryatama dan Setyowati (2021) serta Sakan (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi persoalan rendahnya kemampuan fiskal dan belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kinerja keuangan daerah masih didominasi oleh rendahnya kontribusi PAD, tingginya ketergantungan pada dana transfer, serta perlunya penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk faktor-faktor penghambat dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan pertama terletak pada karakteristik objek penelitian, yaitu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki kondisi unik berupa pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, namun belum diikuti oleh peningkatan kemandirian fiskal dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi, kemampuan fiskal daerah, dan kesejahteraan masyarakat yang belum banyak dikaji secara spesifik pada tingkat kabupaten.

Kebaruan kedua terletak pada fokus penelitian yang tidak hanya menganalisis tingkat kinerja keuangan daerah melalui rasio keuangan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja keuangan serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan, tetapi juga menjelaskan faktor penyebab dan solusi yang dapat dilakukan pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis kinerja keuangan yang mencakup rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan derajat desentralisasi fiskal untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan otonomi daerah. Melalui kombinasi analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih mendalam mengenai tingkat kemandirian fiskal daerah serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan otonomi daerah secara berkelanjutan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran secara mendalam mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan otonomi daerah (Schischke & Rathgeber, 2025). Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi suatu fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan dalam konteks yang alamiah. Pendekatan deskriptif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai kondisi kinerja keuangan daerah, faktor-faktor penghambat, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Selain itu, penelitian ini didukung oleh analisis dokumen keuangan daerah berupa laporan realisasi APBD dan PAD untuk mengukur rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi fiskal sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2016). Moenek et al., (2020:58) menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah karena mampu mencatat seluruh transaksi ekonomi, baik yang melibatkan kas maupun nonkas. Oleh karena itu, laporan keuangan daerah digunakan sebagai sumber data utama dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian (Surya et al., (2023) dalam Sugiono). Informan penelitian terdiri atas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Polewali Mandar sebagai informan kunci karena memiliki

kewenangan dan pemahaman yang menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan daerah. Informan pendukung meliputi Sekretaris BKAD, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, sersta pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi kinerja keuangan daerah, faktor penghambat, dan upaya peningkatan kinerja keuangan daerah (Ardieansyah et al., 2023).

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Gliner et al., 2017). Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan triangulasi teknik melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi (Sugiono, 2020). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Milles & Huberman (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun data keuangan daerah dianalisis menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan derajat desentralisasi fiskal untuk menggambarkan tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu pada bulan Maret hingga Mei 2025, yang meliputi kegiatan observasi awal, pengumpulan dokumen keuangan daerah, pelaksanaan wawancara dengan informan, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang aktual dan komprehensif mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar menggunakan indikator rasio keuangan daerah yang terdiri atas rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan derajat desentralisasi fiskal. Penggunaan indikator tersebut mengacu pada pendapat Mahmudi yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adapun pembahasan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Partisipasi dalam Perencanaan

Penulis melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan bantuan atau dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi (Sinurat, 2018). Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri.

Tabel 1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024

Tahun	PAD (Rp)	Transfer Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Kriteria
2020	212.941.741.000	1.017.969.217.000	20,93	Sangat Rendah
2021	233.474.732.000	1.026.488.150.000	22,75	Sangat Rendah

2022	170.151.767.000	1.033.120.215.000	16,47	Sangat Rendah
2023	194.873.211.000	1.241.432.946.000	15,70	Sangat Rendah
2024	220.171.059.000	1.312.979.241.000	16,77	Sangat Rendah

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 1 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2020–2024 berada pada kategori sangat rendah. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 22,75 persen, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 15,70 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan melalui PAD masih terbatas sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Hasil tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang menyatakan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dana transfer pusat. Pemerintah daerah masih mengandalkan dana transfer untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah karena potensi PAD yang tersedia belum sepenuhnya dapat dioptimalkan.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi laporan realisasi anggaran daerah, diketahui bahwa struktur pendapatan Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi oleh dana transfer yang mencapai lebih dari 80 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri masih belum optimal.

Berdasarkan hasil analisis data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar berada pada kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan sendiri masih terbatas.

3.2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Penulis melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar melalui pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengelola anggaran secara efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Oates, 2006).

Berdasarkan hasil analisis dokumen Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024, rasio efektivitas menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi PAD mampu melampaui target yang ditetapkan sehingga termasuk kategori sangat efektif. Namun pada tahun 2022 hingga 2024 tingkat efektivitas mengalami penurunan karena realisasi PAD tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah belum berjalan secara konsisten.

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa penurunan efektivitas pada beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh belum optimalnya pemanfaatan potensi PAD, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi penerimaan daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, penulis menemukan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Simangunsong, 2017). Namun, tingginya kebutuhan belanja daerah yang tidak selalu diimbangi dengan peningkatan pendapatan menyebabkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil analisis data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, namun efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan masih memerlukan peningkatan agar kinerja keuangan daerah dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara lebih optimal.

3.3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah

Penulis melakukan pengukuran terhadap pemanfaatan hasil pengelolaan keuangan daerah melalui kemampuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menggunakan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah serta tingkat kemampuan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil analisis dokumen Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah dibandingkan dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut tercermin pada derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui sumber pendapatan sendiri masih terbatas. Dengan demikian, hasil pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang diperoleh telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, keterbatasan PAD menyebabkan pemerintah daerah masih mengandalkan dana transfer untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah, terutama pada sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, penulis menemukan bahwa anggaran daerah telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan sesuai prioritas daerah. Akan tetapi, besarnya proporsi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa hasil pengelolaan keuangan daerah belum mampu menciptakan kemandirian fiskal yang optimal.

Berdasarkan hasil analisis data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan hasil pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan bahwa manfaat pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih berada pada kategori sangat rendah. Kondisi tersebut terlihat dari tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dibandingkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan ini sejalan dengan penelitian Chasanah dan Panjawa (2020) yang menemukan bahwa tingginya

ketergantungan terhadap dana transfer berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ketergantungan fiskal masih menjadi tantangan utama bagi banyak pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2020 dan 2021 efektivitas PAD berada pada kategori sangat efektif, namun pada tahun 2022–2024 mengalami penurunan karena realisasi PAD tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Temuan ini memperkuat penelitian Meko et al., (2024) yang menyatakan bahwa optimalisasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan pemerintah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial. Dalam konteks Kabupaten Polewali Mandar, masih terdapat potensi PAD yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga memengaruhi pencapaian target pendapatan daerah.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah masih berada pada kategori kurang efisien hingga tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Lilis dan Permatasari (2025) yang menemukan bahwa rendahnya kontribusi PAD dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer menyebabkan pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang efisien. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Pada aspek pertumbuhan keuangan daerah, penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Polewali Mandar cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya belum berlangsung secara konsisten. Temuan ini memperkuat pendapat Mahmudi et al., (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya secara berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Polewali Mandar masih berada pada kategori rendah. Rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengindikasikan bahwa tujuan desentralisasi fiskal untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chasanah dan Panjawa (2020) serta Lilis dan Permatasari (2025) yang menyimpulkan bahwa rendahnya kontribusi PAD merupakan indikator utama lemahnya kemampuan fiskal daerah.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar menggunakan lima indikator sekaligus, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan derajat desentralisasi fiskal. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan analisis dokumentasi laporan keuangan daerah, tetapi juga didukung oleh hasil wawancara dan observasi lapangan sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya sekaligus memberikan gambaran empiris yang lebih spesifik mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan otonomi daerah.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menemukan bahwa salah satu fenomena menarik dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah adanya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cenderung meningkat dari tahun 2020–2024, namun peningkatan tersebut belum diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum

sepenuhnya mampu dikonversi menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat memperkuat kemandirian fiskal. Dengan kata lain, peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi belum memberikan kontribusi optimal terhadap kemampuan keuangan daerah.

Temuan menarik lainnya adalah masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap dana transfer pemerintah pusat. Meskipun pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang luas melalui kebijakan otonomi daerah, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian keuangan daerah sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu, penulis menemukan bahwa realisasi PAD pada tahun 2022–2024 tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kondisi tersebut berkaitan dengan masih terbatasnya optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam peningkatan kinerja keuangan daerah tidak hanya terletak pada ketersediaan sumber pendapatan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Temuan lain yang juga menarik adalah adanya kesenjangan antara besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya perlu diukur dari besarnya pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga dari sejauh mana pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Polewali Mandar tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal, tetapi juga berkaitan dengan optimalisasi potensi ekonomi daerah, efektivitas pengelolaan pendapatan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengarahkan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan otonomi daerah masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal yang mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, disertai efektivitas PAD yang berfluktuasi, efisiensi pengelolaan keuangan yang belum optimal, serta pertumbuhan keuangan daerah yang belum stabil. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB belum mampu mendorong peningkatan kemandirian fiskal secara signifikan, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas keuangan daerah. Guna meningkatkan kinerja keuangan daerah, pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan pengelolaan aset daerah, memperkuat inovasi fiskal, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal agar mampu mendukung peningkatan kemandirian fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah secara lebih efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi fiskal sehingga belum mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Kedua, penelitian menggunakan data keuangan daerah dalam periode 2020–2024 sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi kinerja keuangan pada rentang waktu tersebut dan belum dapat menunjukkan perkembangan pada periode berikutnya. Ketiga, penelitian dilaksanakan pada satu objek penelitian, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah lainnya yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian menyebabkan pengumpulan data primer melalui wawancara hanya dilakukan kepada informan yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terbatas pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, baik melalui perbandingan dengan kabupaten/kota lain maupun dengan menambahkan variabel yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti kapasitas fiskal, pengelolaan aset daerah, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah serta instansi terkait yang telah memberikan izin, data, informasi, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan keterangan yang diperlukan selama proses penelitian. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (Pertama). Deepublish Publisher.

Carolin Stephanie Serafin Meko, Maria Prudensiana Leda Muga, & Novi Theresia Kiak. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Akuntan Publik*, *2*(4), 01–17. https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i4.4317

Chasanah, S. N., & Panjawa, J. L. (2020). Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, *5*(2), 151–173. https://doi.org/10.52062/keuda.v5i2.1221

Creswell, J. W. C. J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *SAGE* (Fifth). SAGE. https://doi.org/10.4324/9780429469237-3

Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2017). *Research Methods In Applied Settings*. Routledge.

Ireeuw, S. V. M., Layuk, P. K. A., & Rante, A. (2020). Pengaruh Pengawasan, Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *AkMen JURNAL ILMIAH*, *17*(4), 548–557. https://doi.org/10.37476/akmen.v17i4.1154

Lilis, R., & Permatasari, I. (2025). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2021-2024*. *4*, 1–16. https://doi.org/10.53697/emak.v6i4.2900

Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.

Milles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*.

Moenek, R., Suwanda, D., & Rachmat, B. (2020). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah*. REMAJA ROSDAKARYA.

Ningsih, S. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Buton Utara. *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, *1*(01), 32–44. https://doi.org/10.62668/jiar.v1i01.118

Oates, W. E. (2006). On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization. *Institutional Foundations of Public Finance*, *October 2006*, 165–189. https://doi.org/10.2307/j.ctv1nzfgfp.14

Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Accountability*, *6*(1), 45. https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56

Piola, M. P. S. (2022). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah*, *2*(1), 236–253. https://doi.org/10.58176/akasyah.v2i1.65

Puryatama, A. F., & Setyowati, K. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, *3*(1), 67–75. https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i1.11861

Sakan, L. A. C. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, *10*(2), 129–140. https://doi.org/10.35508/jak.v10i2.8727

Schischke, A., & Rathgeber, A. (2025). Commodities and monetary policy—the role of interest rates revisited. *Journal of International Money and Finance*, *158*(August), 103416. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2025.103416

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Y. Sartika (ed.)).
Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Ketiga). Alfabeta.
Surya, A., . S., & Shaddiq, S. (2023). Village Development Study Based on the Developing Village Index in Bati-Bati District, Tanah Laut Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, *06*(09), 4333–4343. https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i9-50
Suwanda, D., Khairi, H., & Sinurat, M. (2023). *Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan* (Y. P. Santoso (ed.)). Cendekia press.
Thahir, B. (2019). *Pemerintah dan Pemerintah Indonesia (SEBUAH BUNGA RAMPAI)*.